



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

RENCANA PEMBENTUKAN *FAMILY OFFICE* UNTUK MENARIK INVESTASI KE INDONESIA

Dian Cahyaningrum

Analisis Legislatif Ahli Madya
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Rizky Allam Zandriyan Pratama

Analisis Legislatif Ahli Pertama
rizky.pratama2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah sedang berupaya menarik investasi untuk menjaga laju ekonomi domestik, antara lain dengan menjajaki pembentukan kantor keluarga (*family office*). *Family office* adalah entitas keuangan yang mengelola kekayaan dan urusan keuangan untuk keluarga atau beberapa keluarga terkaya di dunia, menyediakan layanan terintegrasi seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan administrasi kekayaan. Usul pembentukan *family office* berasal dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Presiden juga telah menunjuk Luhut memimpin kajian *family office* dengan membentuk *Wealth Management Centre* (WMC).

Usul pembentukan *family office* tidak terlepas dari besarnya potensi dana kelolaan di dunia yang dapat dimanfaatkan jika dapat ditarik ke Indonesia. Mengutip *The Wealth Report 2024* yang dirilis Knight Frank, populasi orang superkaya global diproyeksikan tumbuh 28,1% selama lima tahun hingga 2028. Diperkirakan populasi individu superkaya di Asia tumbuh hingga 38,3% selama periode 2023-2028. Ada 2 negara yang menjadi basis *family office*, yakni Singapura dengan 1.500 *family office* dan Hong Kong memiliki 1.400 *family office*. Tensi geopolitik yang meningkat belakangan ini dan perubahan regulasi investasi di Singapura dapat meningkatkan ketidakpastian bagi investor. Indonesia dapat mengambil kesempatan untuk menjadi alternatif tempat penempatan dan pengelolaan dana dengan membentuk WMC. Pertimbangannya karena kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup kuat, politik cukup stabil, dan orientasi geopolitik Indonesia netral. Senada dengan Luhut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, juga mengemukakan besarnya potensi *family office* di dunia, yaitu mencapai US\$11,7 triliun atau sekitar Rp191,48 kuadriliun (nilai kurs US\$1 = Rp16.360). Jika dana tersebut dapat ditarik ke Indonesia sebesar 5% maka akan ada dana sekitar US\$585 miliar (sekitar Rp9,5 triliun).

Family office dapat menimbulkan dampak positif yaitu meningkatkan peredaran modal di dalam negeri, meningkatkan produk domestik bruto dan membuka lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal. Selain itu, melalui investasi dalam berbagai sektor ekonomi dan proyek infrastruktur, *family office* tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dengan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia di sektor keuangan serta dukungan terhadap kegiatan filantropi, pendidikan, dan kesehatan juga memperkuat peran *family office* sebagai mitra strategis dalam mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain dampak positif, ada risiko yang harus diwaspadai dari pembentukan *family office*. Menurut Direktur Eksekutif Research Institute, Piter Abdullah, *family office* dapat mendatangkan masalah bagi neraca pembayaran. Menarik investasi asing ke Indonesia diikuti konsekuensi pembayaran keuntungan (repatriasi dividen) ke luar negeri, dikhawatirkan dapat melemahkan rupiah.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira juga mengkritisi *family office* dari sisi penerimaan negara. Menurut Bhima, pembentukan *family office* dapat menyulitkan pemerintah untuk mengejar pajak orang kaya (*crazy rich*). Jika *family office* bebas pajak maka dapat menyulitkan pemerintah dalam mengungkap, menyidik, dan mengenakan pajak pada orang kaya. Padahal peningkatan kepatuhan pajak orang kaya merupakan aspek penting untuk menambah penerimaan negara. Rencana pembentukan *family office* juga bertolak belakang dengan hasil survei *Earth For All 2024* yang menunjukkan sebanyak 86% masyarakat di Indonesia mendukung pemberlakuan pajak kekayaan (*wealth tax*). Pengenaan pajak progresif terhadap kelompok kaya merupakan bentuk keadilan, selain juga dapat memberikan pendapatan negara yang lebih optimal. Terkait pendapat Bhima, Sandiaga Uno menjelaskan bahwa dana yang masuk nantinya memang bebas pajak, namun orang-orang kaya diwajibkan untuk berinvestasi di Indonesia. Bisnis dari hasil investasi inilah yang dikenai pajak.

Risiko lainnya dari *family office* adalah potensi terjadinya *money laundering*. Potensi *money laundering* muncul dari manajemen kekayaan besar dan transaksi kompleks, memungkinkan penyalahgunaan untuk mencuci uang. Tingkat privasi yang tinggi dan operasi lintas yurisdiksi juga dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Selain itu, struktur kepemilikan yang kompleks bisa digunakan untuk menyembunyikan identitas yang sebenarnya. Sehubungan dengan berbagai risiko tersebut maka perlu kehati-hatian dalam merealisasikan rencana pembentukan *family office*.

Atensi DPR

Family office diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia, terutama dalam meningkatkan investasi. Namun, ada beberapa risiko yang harus diwaspadai dari pembentukan *family office*, antara lain mendatangkan masalah bagi neraca pembayaran seiring dengan melemahnya rupiah akibat repatriasi dividen ke luar negeri; kurang optimalnya perolehan pendapatan negara dari pajak; dan potensi terjadinya *money laundering*. Untuk itu, rencana pembentukan *family office* harus dilakukan secara hati-hati. Komisi VI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan kajian yang komprehensif, terutama terkait *regulatory impact assesment* dari kebijakan pembentukan *family office*. Kajian diperlukan agar orang-orang kaya tertarik menempatkan dananya dan berinvestasi di Indonesia terutama di sektor riil. Kajian juga diperlukan agar risiko yang dikhawatirkan muncul, terutama terjadinya *money laundering* dapat dicegah. Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif agar pemilik dana tertarik berinvestasi di Indonesia sehingga *family office* benar-benar mendatangkan manfaat optimal untuk kesejahteraan rakyat.

Sumber

bbc.com, 5 Juli 2024;
Bisnis Indonesia, 2 & 4 Juli 2024;
 cnbcIndonesia.com, 3 & 5 Juli 2024;
Kontan, 2 & 5 Juli 2024;
Rakyat Merdeka, 2 Juli 2024.



Koordinator Sali Susiana
 Polhukam Puteri Hikmawati
 Ekkuinbang Sony Hendra P.
 Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro
 Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
 Sri Nurhayati Q.
 Sulasi Rongiyati
 Suhartono
 Venti Eka Satya
 Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetyawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Kesra
 Yulia Indahri
 Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
 Nur Sholikhah P.S.
 Fieka Nurul A.